

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN OPERASI PELAYANAN KAPAL

M. Aji Luhur Pambudi^{1*}, Enrico Reza Mahendra¹, Tiara Zahwa Indrawas¹

¹Program Studi Transportasi Laut, Politeknik Bumi Akpelni

Jl. Pawiyatan Luhur II/17, Bendan Duwur, Gajahmungkur, Semarang, Jawa Tengah 50235

*Email: m.ajiluhur@akpelni.ac.id

Abstrak

Pelabuhan merupakan tempat yang terdiri dari daratan dan perairan dengan batas-batas yang digunakan sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan untuk tempat berlabuh, sandarnya kapal, naik dan turunnya penumpang serta bongkar muat yang dapat berupa barang, hewan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan sebagai tempat berpindah intra dan antar moda transportasi. Perkembangan pelabuhan dapat ditentukan salah satunya dengan perkembangan aktivitas dari pelabuhan itu sendiri, semakin banyak aktivitas yang terjadi pada pelabuhan maka semakin besar juga pelabuhan tersebut. Faktor lain mempengaruhi perkembangan perdagangan dilihat dari jenis kapal dan lalu lintas kapal yang melewati pelabuhan tersebut. Sehingga untuk setiap negara berusaha untuk membangun serta mengembangkan pelabuhan sesuai dengan tingkat aktivitasnya dan keramaian serta jenis perdagangannya. Alat transportasi laut mempunyai keuntungan lebih dibandingkan dengan alat transportasi lainnya karena dapat mengangkut penumpang, barang dan hewan dengan kapasitas / daya angkut yang sangat besar, disamping itu untuk biaya yang dikenakan juga terjangkau dan aman. Pelayanan jasa kepelabuhanan mempunyai tujuan melayani kapal dan dioperasikan perusahaan angkutan di perairan pelayanan kapal berada di garis terdepan, menyusul pelayanan terhadap muatan kapal itu sendiri diikuti berbagai macam pelayanan fisik dan administrasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung mengarah ke analisis, proses kejadian dan makna (subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui proses bagaimana proses perencanaan saat proses pelayanan kapal dan apa saja pelaksanaan yang diterapkan oleh instansi yang terlibat saat proses pelayanan kapal. Maka dari itu dari penelitian ini penulis ingin menjabarkan proses perencanaan dan pelaksanaan operasi pelayanan kapal yang terjadi di Pelabuhan Indonesia.

Kata Kunci: Pelabuhan, Operasi Kapal, Pelayanan, Transportasi Laut

Abstract

A port is a place consisting of land and waters with boundary boundaries that are used as places of government activities and economic activities used for berths, berthing ships, boarding and disembarking passengers, and loading and unloading which can be in the form of goods, animals equipped with shipping safety facilities and port supporting activities as a place for intra- and intermodal transportation transfers. The development of the port can be determined, one of which is by the development of activities from the port itself, the more activities that occur at the port, the larger the port will be. Another factor influencing the development of trade is seen in the type of ships and ship traffic passing through the port. So that each country strives to build and develop ports according to the level of activity and the crowds and types of trade. Marine transportation equipment has more advantages compared to other transportation tools because it can carry passengers, goods, and animals with a very large capacity / carrying capacity, besides that the costs charged are also affordable and safe. Port services have the purpose of serving ships and are operated by transport companies in the waters of ship service is at the forefront, following the service of the ship's cargo itself followed by various kinds of physical and administrative services. In this study using qualitative method are descriptive and tends to lead to analysis, the process of occurrence and meaning (subject) is more highlighted in qualitative research. The purpose of this study is to find out the process of how planning process during the ship service process and what implementations are applied by the agencies involved in the ship service process. Therefore, from this study, the author wants to describe the process of planning and implementing ship service operations that occur in Indonesian ports.

Keywords: Port, Ship Operations, Service, Sea Transportation

PENDAHULUAN

(Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2012) mengatakan bahwa (Direktur Jenderal Perhubungan Laut), Mengenai keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.002/38/13/18/DJPL – 11 tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyelenggarakan sosialisasi standar mengenai kinerja pelayanan operasional pelabuhan. Standar kinerja pelayanan operasional merupakan standar hasil kerja dari tiap tiap pelayanan yang harus dicapai oleh operator terminal/pelabuhan dalam pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhan termasuk dalam penyediaan fasilitas dan peralatan pelabuhan.

LANDASAN TEORI

(Don & Profesional, 2019), Pelabuhan adalah tempat bongkar muat barang serta naik dan turunnya penumpang. Pelabuhan mempunyai peran yang penting dalam segi ekonomi, politik dan sosial dikarenakan mampu untuk membuka daerah yang terisolasi sehingga kedepannya timbul arus barang dan penumpang.

Standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan dan utilisasi ditetapkan dengan mengamati tingkat kualitas pelayanan kapal, pelayanan barang, utilisasi fasilitas, kesiapan peralatan pelabuhan dan disesuaikan dengan karakteristik di masing masing lokasi terminal pada pelabuhan, lalu untuk standar pelayanan operasional kapal angkatan laut, kinerja bongkar muat barang non petikemas dan petikemas ditetapkan untuk masing masing terminal/pelabuhan.

(Triatmodjo, 2009), Pembangunan pelabuhan memerlukan biaya yang besar, maka dari itu diperlukan perhitungan dan pertimbangan untuk memutuskan pembangunan suatu pelabuhan. Dalam suatu pembangunan terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan, yaitu faktor ekonomi, volume perdagangan laut dan adanya hubungan dengan daerah pedalaman. Dalam pembangunan pelabuhan diperlukan untuk

melayani dan meningkatkan kegiatan ekonomi dalam daerah, untuk menunjang arus perdagangan yaitu ekspor impor.

Yang perlu diperhatikan dalam merencanakan, merancang dan melaksanakan pelabuhan seperti peran dari organisasi yang mendukung dalam nilai ekonomi dan dapat diterima secara luas. Peran struktural dengan menyediakan sarana prasarana untuk menjalankan peran dari organisasi, peran fungsional dengan menguraikan kerja yang perlu dilakukan dalam kerangka peran struktural, peran komersial dengan menetapkan besaran biaya yang terfokus (Triatmodjo, 2009).

Oleh karena itu dengan mengacu Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut penulis ingin menjabarkan mengenai proses perencanaan dan pelaksanaan operasi pelayanan kapal yang terjadi di terminal/pelabuhan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Karena metode penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami kejadian yang dialami oleh subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen operasional adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan barang, jasa dan kombinasinya, melalui proses transformasi dari sumber daya produksi menjadi keluaran yang diinginkan” (Herjanto, 2007). “Manajemen operasional adalah sistem manajemen atau serangkaian proses dalam pembuatan produk atau penyediaan jasa” (Stevenson, 2009).

(Gultom, 2007), Mengatakan bahwa, “Kinerja Operasional suatu pelabuhan ditentukan oleh kinerja dari terminal-terminal yang ada dipelabuhan tersebut dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat barang disesuaikan dengan jenis barang, kemasan barang yang akan ditangani dan jenis kapal yang dilayani”. Fungsi kinerja operasional di

pelabuhan merupakan sebagai alat analisis untuk kepentingan manajemen dalam mengelola pelabuhan, menentukan perencanaan operasional, untuk pengembangan pelabuhan dan menetapkan kebijakan dalam peningkatan pelayanan.

Perencanaan Pelayanan Operasional Kapal dan Barang



Gambar 1. Alur Pemanduan Kapal

Sumber : <https://www.indonesiaport.co.id>

Menurut Pengertian Pemanduan Kapal Menurut Diktat PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Perak didalam jurnal Haryono, (Haryono, 2016), “Pemanduan Kapal adalah kegiatan pandu dalam membantu Nahkoda kapal, agar navigasi dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar dengan memberikan informasi tentang keadaan perairan setempat yang penting demi keselamatan kapal, penumpang dan muatannya sewaktu memasuki alur pelayaran menuju dermaga”.

Proses permohonan jasa pandu yang panjang dan jarak antara kantor pandu yang panjang dan jarak antara kantor pandu dengan dermaga yang tidak dekat, sehingga terdapat ketidakefektifan dan efisien dalam kegiatan pemanduan, selain itu masih dijumpai pelanggan yang belum puas dengan pelayanan yang diberikan petugas saat melakukan tugasnya, seperti kurang ramahan petugas saat sedang memberikan pelayanan, hal ini tentu berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada saat menggunakan layanan jasa kependuan. (Nunuk Widyawati Kusuma, 2015)

1. Perencanaan Pemanduan Kepala Sub Dinas Perencanaan Pemanduan bertugas:
 - a. Menerima PPKB (Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang) dari

agen pelayaran yang telah ditetapkan oleh petugas PPSA (Pusat Pelayanan Satu Atap) dan telah ada bukti pengesahan pembayaran dari petugas Uper/ Non uper.

- b. Mengevaluasi dan mengoreksi kebenaran data-data kapal dan bukti pembayaran yang telah disyahkan.
2. Merencanakan dan menetapkan jam pelayanan pemanduan.
 3. Menandatangani PPKB yang telah ditetapkan kepada agen pelayaran. Kepala Satuan Pelaksana Perencanaan Pelayanan Pemanduan bertugas :
 - a. Menerima PPKB dan menuliskannya ke dalam Daftar Rencana Harian Gerakan Kapal dan pelaksanaannya.
 - b. Menginformasikan ke kapal sehubungan dengan rencana pelayanan pemanduan melalui Menara Pengawas Kependuan. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Telepon dan Radio bertugas Menerima informasi rencana pelayanan pemanduan untuk diteruskan kepada kapal yang akan dilayani, jika kapal yang akan dilayani siap.

Kepala Dinas Pemanduan bertugas:

- a. Membuat Surat Perintah Kerja (SPK) pandu bandar dan menandatangani kemudian diserahkan kepada pandu yang bersangkutan, untuk selanjutnya diteruskan kepada kepala sub dinas operasi sarana pemanduan untuk penyiapan sarana yang dibutuhkan, jika kapal yang akan dilayani tidak siap.
- b. Pelaksanaan pelayanan pemanduan dibatalkan dan apabila ada kapal telah siap pihak pelayaran membuat PPKB baru.

Pelaksanaan Pelayanan Kapal dan Barang.

Pelaksanaan Pelayanan Jasa Pelabuhan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pelayanan untuk kapal dan pelayanan untuk barang.

1. Pelayanan Jasa Kapal

Merupakan jasa kegiatan operasional kapal mulai dari masuk hingga keluar pelabuhan, menurut (Gunawan, 2014) dalam bukunya yang berjudul Pengantar Transportasi dan Logistik, Pelayanan jasa kapal meliputi pelayanan:

- 1) Jasa labuh Adalah Pelayanan pelabuhan yang diberikan terhadap kapal untuk berlabuh dengan aman sambil menunggu pelayanan berikutnya untuk bertambat di pelabuhan, atau bongkar muat (midstream, loading/unloading atau melaksanakan kegiatan lainnya (docking, pengurusan dokumen dan lain- lain).
 - 2) Jasa Pandu Pelayanan jasa pandu terdiri atas pemanduan kapal dan penundaan kapal.
 - 3) Jasa tunda dan Kepil Pelaksanaan pekerjaan untuk mengikat dan melepaskan tali kapal- kapal yang berolah gerak akan bersandar atau bertolak dari atau satu dermaga, jembatan, pelampung, dolphin dan lain-lain.
 - 4) Jasa tambat Jasa yang diberikan untuk kapal bertambat pada tambatan dan secara teknis dalam kondisi yang aman untuk dapat melakukan bongkar muat dengan lancar dan aman.
2. Pelayanan Barang Merupakan pelayanan bongkar/muat mulai dari kapal hingga penyerahan ke pemilik barang atau sebaliknya. Berdasarkan (Menteri, 1994) KM 65 Tahun 1994 yang dikutip oleh (Suyono, 2007) dalam bukunya.
- 1) Jasa dermaga Setiap barang yang dimuat dan dibongkar lewat dermaga dikenakan uang dermaga (wharfage). Tarif uang dermaga didasarkan pada Ton/M 3 barang (KM 65 Tahun 1994, Bab VIII, pasal 10).
 - 2) Jasa Penumpukan Untuk barang-barang yang ditumpuk sementara, baik dalam gudang maupun lapangan terbuka dikenakan biaya penumpukan. Tarif jasa penumpukan didasarkan pada Ton/M 3 barang dan hari lamanya penumpukan. Dalam

tarif penumpukan terdapat hari-hari dimana sewa penumpukan dibebaskan.

- 3) Jasa penyewaan alat-alat Untuk penyewaan alat-alat bongkar muat dan lain sebagainya ditentukan tarifnya oleh masing-masing pelabuhan.

Hambatan-hambatan yang Terjadi pada Pelayanan Pemanduan Kapal

Menurut (Andrianto & dkk, 2016) mengungkapkan Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pelayanan kapal adalah atribut prioritas utama yang menurut persepsi pengguna jasa memiliki tingkat kepentingan yang tinggi akan tetapi tingkat kinerjanya rendah adalah:

1. Ketepatan pelayanan dokumen
Sudah adanya sistem yang terintegrasi pada pelayanan dokumen akan tetapi masih belum diterapkan sehingga mengakibatkan rawan terjadinya pungutan liar (pungli).
2. SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran)
Tersedianya sistem kenavigasian akan tetapi tidak digunakan untuk memonitoring dan pengawasan sehingga mempermudah pelaksanaan pemanduan kapal yang lebih baik.
3. Ketersediaan kapal tunda/pandu
Belum adanya cadangan kapal tunda/pandu apabila terjadi kerusakan atau perawatan berkala, sehingga kapal-kapal yang membutuhkan pelayanan pemanduan harus menunggu kapal tunda/pandu untuk waktu yang cukup lama.
4. Ketersediaan fasilitas untuk petugas pandu
Fasilitas yang belum tersedia untuk kegiatan operasional pelaksanaan pemanduan kapal dan kelayakan tempat tinggal bagi petugas pandu laut di lapangan, sehingga hanya ditempatkan di Stasiun Pandu (Pilot Station).

KESIMPULAN

Untuk merencanakan dan melaksanakan pelayanan kapal dan barang banyak faktor yang mempengaruhi mulai dari manajemen operasional kepelabuhanan,

sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada di pelabuhan/terminal. Ketepatan mulai dari komunikasi awal masuk kapal hingga keluar, lalu proses pembongkaran barang membutuhkan komunikasi yang baik antar pihak yang berada dipelabuhan. Mengevaluasi dan mengoreksi kebenaran data-data kapal dan bukti pembayaran yang telah disahkan.

DAFTAR PUSTAKA

Andrianto, Y., & dkk. (2016). *Faktor faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan*. Direktur Jenderal Perhubungan Laut. (t.thn.). Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan. Dalam D. J. Laut. Jakarta.

Don & Profesional. (2019, Mei 21). *Donpro*. Dipetik 12 15, 2022, dari <https://donproconsultant.com/news/pertimbangan-dasar-perencanaan-pelabuhan/>

Gultom. (2007). *Kinerja Operasional Pelabuhan*.

Gunawan, H. (2014). *Pengantar Transportasi dan Logistik*.

Haryono, B. A. (2016). Pemanduan Kapal. *Jurnal Haryono*.

Herjanto. (2007). *Manajemen Operasional*. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2012, Maret 8). *Port operational service performance, the benchmark of of sea transportation implementation*. Retrieved from <http://dephub.go.id/>: <http://dephub.go.id/post/read/kinerja-pelayanan-operasional-pelabuhan-tolak-ukur-keberhasilan-penyelenggaraan-transportasi-laut-11100>

Menteri, K. (1994). *Tarif Uang Dermaga*.

Nunuk Widyawati Kusuma, d. (2015). *Layanan Jasa Kepanduan*.

Stevenson. (2009). *Sistem Manajemen Operasional*.

Suyono. (2007). *Jasa Dermaga*.

Triatmodjo, B. (2009). *Perencanaan Pelabuhan*. Yogyakarta: Beta Offset.